

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang responsive dalam jangka panjang terhadap kondisi yang dihadapi daerah, berorientasi kedepan dan berupaya membangun masyarakat berbasis perspektif kebutuhan daerah, dengan memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang ada. Rencana strategis instansi pemerintah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta bersifat indikatif.

Renstra satuan kerja merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan isu-isu permasalahan strategis pembangunan daerah yang menjadi kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan serta program-program strategis yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana, bertahap dan mempunyai tolak ukur serta target pencapaian kinerja yang jelas melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan. Renstra merupakan turunan / penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan visi dan misi Kepala Daerah terpilih dan merupakan pedoman perencanaan bagi Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan maupun rencana Unit Pelaksana Teknis yang ada dibawah Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk mendapatkan dukungan yang optimal dalam implementasinya maka proses penyusunan Renstra OPD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder melalui proses yang transparan, demokratis, terpadu dan akuntabel. Tanpa perencanaan strategis yang baik maka instansi pemerintah kemungkinan besar tidak akan dapat mencapai tujuannya.

Revisi Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan hasil integrasi dari rencana-rencana pembangunan Pusat maupun regional sektor kelautan dan perikanan. yang berfungsi sebagai pedoman atau acuan bagi penyusunan seluruh dokumen

perencanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan selama rentang waktu tahun 2016-2021.

Pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Pesisir Selatan sejak tahun 2016 berpedoman kepada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2021 dan di revisi menjadi Rencana Strategis Dinas Perikanan serta RPJMD 2016-2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 yang direvisi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor xxx Tahun xxxxx tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016–2021.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra ini, sejumlah peraturan digunakan sebagai rujukan, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang -undang nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Perpres No. 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2015-219

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) Kabupaten Pesisir Selatan.
10. Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010 - 2030
11. Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2016 – 2021.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perikanan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 ini disusun sebagai acuan resmi bagi Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan, swasta, dan masyarakat umum dalam pembangunan bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 :

1. Menjabarkan secara umum kondisi bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan sekaligus menjelaskan arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu tertentu dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;

2. Memberi arah kebijakan perencanaan serta prioritas pembangunan bidang kelautan dan perikanan tahun 2016-2021;
3. Memudahkan seluruh jajaran Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur;
4. Sebagai pedoman dalam pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban, dan evaluasi kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan
- 2.2 Sumber Daya Dinas Perikanan
 - 2.2.1 Sumber Daya Manusia
 - 2.2.2 Sarana dan Peralatan Penunjang (Asset Dinas Perikanan)
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERIKANAN

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas

Perikanan

3.2. Telaah Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaah Renstra

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang strategi dan kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan

Dasar hukum pendirian Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perikanan.

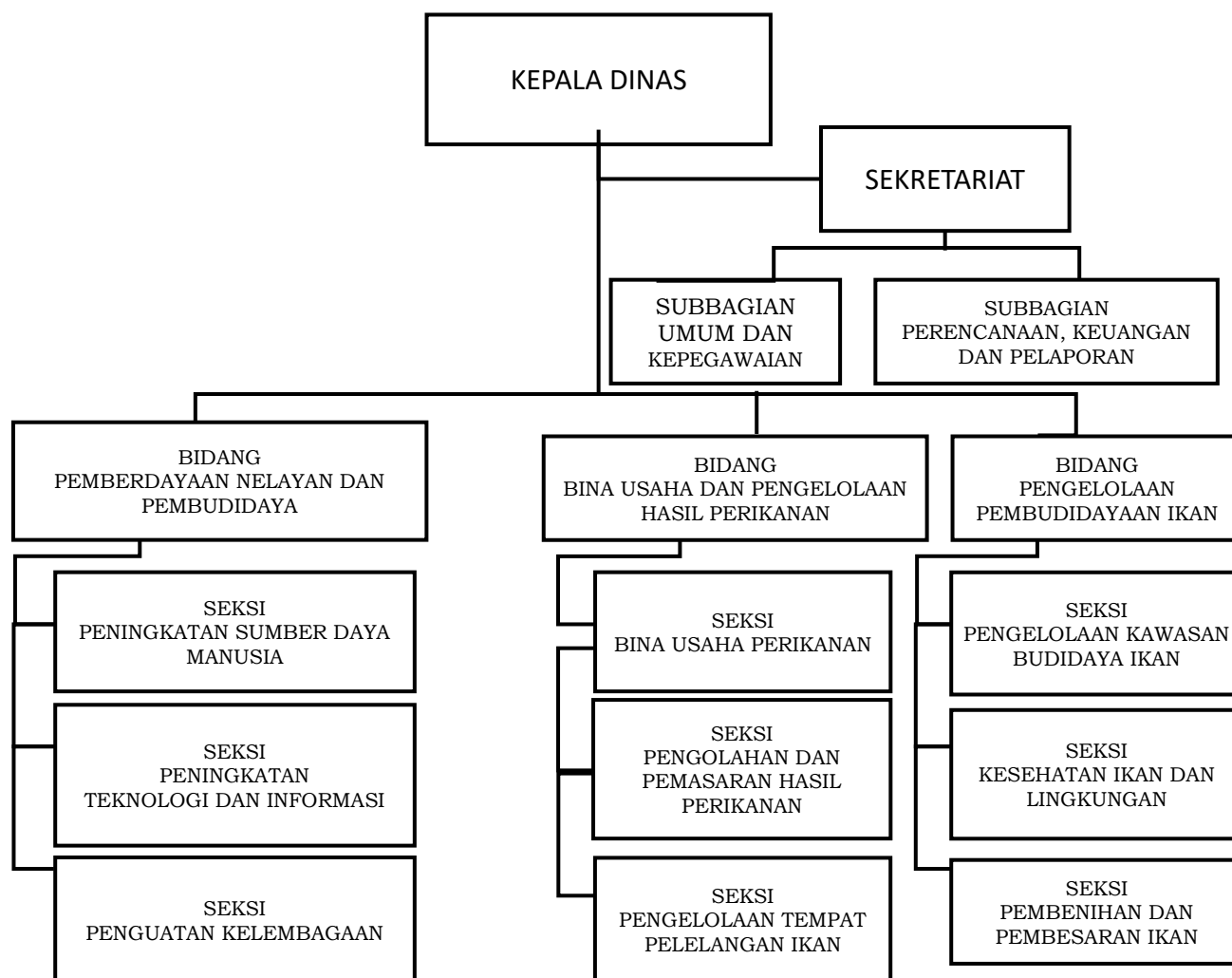
Struktur organisasi pada Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, di pimpin oleh Sekretaris , terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- c. Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya, di pimpin oleh Kepala Bidang terdiri atas ;
 - 1. Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia;
 - 2. Seksi Peningkatan Teknologi dan Informasi;
 - 3. Seksi Penguatan Kelembagaan.
- d. Bidang Bina Usaha dan Pengelolaan Hasil Perikanan, di pimpin oleh Kepala Bidang , terdiri atas ;
 - 1. Seksi Bina usaha perikanan;
 - 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - 3. Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.
- e. Bidang Pengelolaan Pembudidayaan ikan, di pimpin oleh Kepala Bidang terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya ikan;
 - 2. Seksi Kesehatan Ikan dan lingkungan; dan
 - 3. Seksi Pembenihan dan Pembesaran ikan.

- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- g. Jabatan Fungsional

Berikut bagan struktur organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan :

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan (Berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016)



Rincian Tugas Pokok dan fungsi organisasi di Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan diatur dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan.

2.2. Sumber Daya Dinas Perikanan

Sumber daya yang dimiliki Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya , mencakup sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung (asset/modal) dan unit usaha yang masih operasional.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Perkembangan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Laki-laki	30	28	28	29	31
2	Perempuan	14	14	13	13	13
		44	42	41	42	44

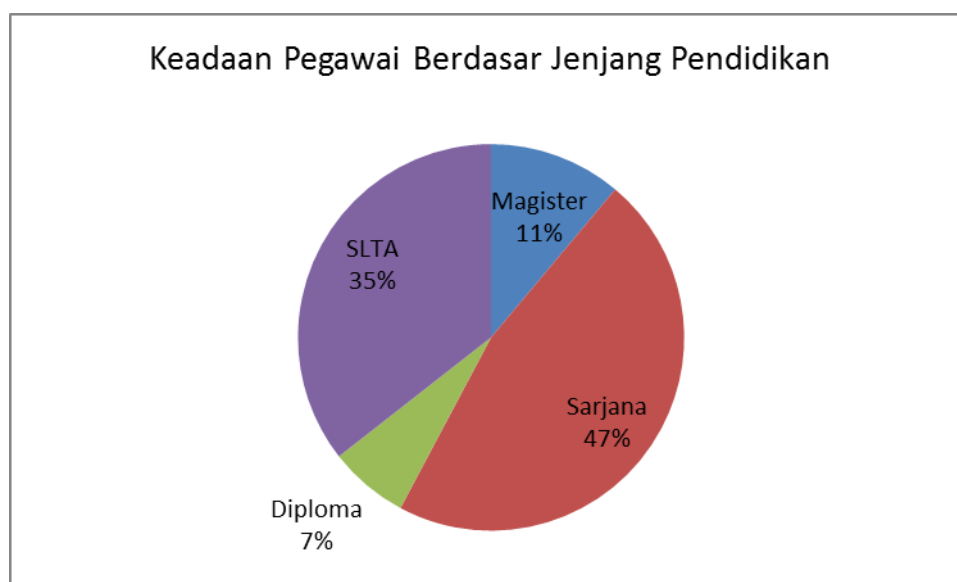
Terdapat kecenderungan peningkatan jumlah pegawai pada Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan pegawai baru, karena adanya SOTK Baru tahun 2015. Kondisi tersebut memperkuat kinerja organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan.

Optimalisasi pegawai dapat berjalan dengan baik, hal tersebut disebabkan karena mayoritas pegawai di Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan berpendidikan baik, yaitu

Tabel 2.2

Keadaan Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2011-2015

No.	Pendidikan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Magister	4	4	4	4	5
2	Sarjana	21	19	19	18	21
3	Diploma	4	4	3	3	3
4	SLTA	13	13	15	16	16
5	SLTP	2	2			
		44	42	41	42	44

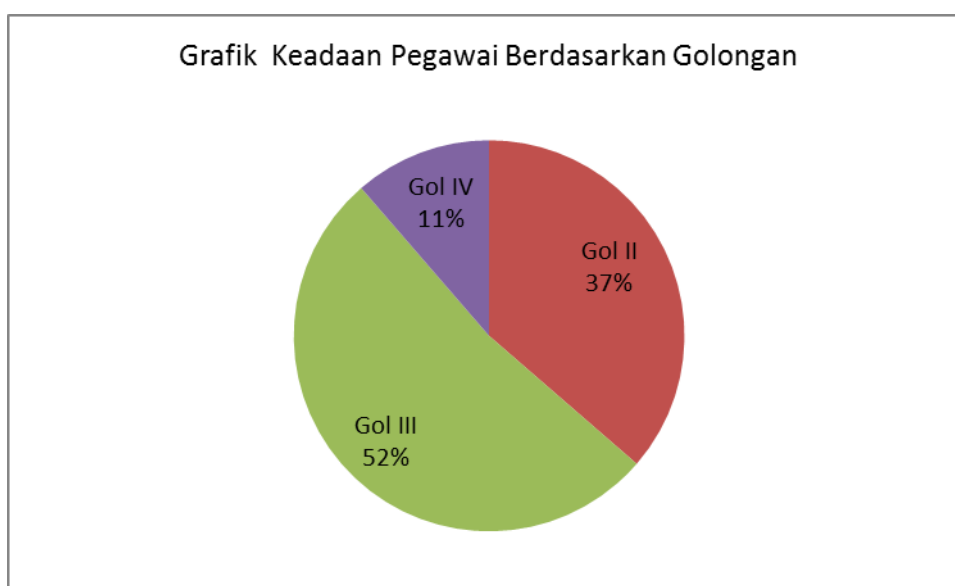


Dari grafik di atas terlihat bahwa SDM yang ada di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan sudah baik, dengan persentase 59,09 % berpendidikan S-1 dan S-2. Hal ini meningkat dibanding tahun 2014 sebesar 52,38 %. Diharapkan persentasi ini akan semakin meningkat di tahun-tahun mendatang sebagai bentuk peningkatan kualitas SDM di Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan.

Dilihat dari golongan, pegawai di Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagian besar merupakan pegawai dengan golongan III, yaitu sebesar 47,72%.

Tabel 2.3
Keadaan Pegawai Berdasar Golongan Tahun 2011-2015

No.	Golongan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Gol I	2	2			
2	Gol II	12	12	15	15	16
3	Gol III	26	26	22	23	23
4	Gol IV	4	4	4	4	5
		44	44	41	42	44



2.2.2. Sarana dan Prasarana Penunjang Dinas Perikanan

Selain pentingnya sumber daya manusia yang mencukupi secara kualitas maupun kuantitas, diperlukan juga dukungan sarana prasarana yang mencakup data asset/mdal yang dimiliki oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

Tabel. 2.4.

Sarana dan Prasarana Penunjang Dinas Perikanan

No	Uraian	Satuan	Kondisi	
			Baik	Rusak
1.	Laptop	Unit	23	-
2.	Mobil	Unit	3	-
3.	Motor	Unit	28	1
4.	Tanah	Sertifikat	5	-
5.	Lemari	Buah	15	-
6.	Kursi	Buah	30	-
7.	Filling besi	Buah	23	-
8.	Meja	Buah	30	-
9.	Komputer PC	unit	5	-

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Kinerja pelayanan disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dapat lebih terarah baik disegi administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang sangat terbatas. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan, maka jenis pelayanan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan teknis serta penyusunan program dan kegiatan teknis dan strategis dalam pembangunan bidang kelautan dan perikanan
2. Memberikan pelayanan umum, baik berupa pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun kepada instansi vertikal ataupun horizontal.
3. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi bidang kelautan dan perikanan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten.

Berdasarkan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan pencapaian target kinerja selama periode 2011 – 2015 dapat dijelaskan melalui tabel 2.5 sebagai berikut :

TABEL . 2.5																			
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERIKANAN																			
KABUPATEN PESIR SELATAN																			
No.	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM)	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAIN	TARGET KINERJA TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN KE					RASIO CAPAIAN KINERJA PADA TAHUN KE				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1.	2	3		5	7	8	9	10	11	7	8	9	10	11	7	8	9	10	11
1	Meningkanya Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	-	-	-	31.683	33.331	35.330	37.804	39.625	30.897	32.209	35.759	37.555	37.501	97,52	96,63	101,21	99,34	94,64
2	Meningkanya Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	-	-	-	3.827	5.460	7.950	11.293	13.120	2.660	5.485	8.520	11.852	10.120	69,51	100,46	107,17	104,95	77,13
3	Terlaksananya Pengawasan Perairan (kali)	-	-	-	4	4	5	6	4	4	4	5	5	4	100,00	100,00	100,00	83,33	100,00
4	Restocking Perairan Umum (Unit)	-	-	-	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3	100,00	133,33	100,00	66,67	100,00

Berdasarkan pada Tabel. 2.5 diatas dapat dilihat bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan selama masa renstra tahun sebelumnya ada beberapa target yang telah mencapai target yang telah ditentukan dan ada beberapa target yang tidak mencapai dari target ditentukan , misalnya Produksi Perikanan Budidaya capaian hanya 77,13 % , hal ini disebabkan karena terjadinya bencana alam (banjir bandang) yang menyebabkan ikan yang akan di panen hanyut terbawa arus.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 – 2015 apabila dilihat dari segi realisasi pagu anggaran guna mendukung ketercapaian target kinerja dapat dijabarkan dalam tabel 2.6 sebagaimana berikut :

TABEL 2.6																		
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANGAN DINAS PERIKANAN																		
KABUPATEN PESIR SELATAN																		
No.	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	ANGGARAN	REALISASI
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	PENDAPATAN																	
	BELANJA																	
	BELANJA LANGSUNG																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	377.730.700	561.302.200	591.002.208	582.602.208	747.018.405	377.730.700	536.425.607	569.018.496	559.457.979	660.454.148	100,00	95,57	96,28	96,03	88,41	20,17	16,12
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	322.453.500	535.454.000	504.264.000	688.901.310	981.750.690	322.453.500	519.065.323	485.830.368	640.541.880	971.737.282	100,00	96,94	96,34	92,98	98,98	34,84	34,53
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	25.000.000	12.481.500	-	-	-	25.000.000	12.481.500	-	-	-	100,00	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	(12,52)	(12,52)
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	-	25.000.000	25.000.000	28.200.000	25.580.000	-	23.850.000	22.625.000	4.932.400	25.329.100	#DIV/0!	95,40	90,50	17,49	99,02	0,88	82,55
5	Program Penyediaan Sarana Statistik Kelautan dan Perikanan	241.552.000	241.552.000	-	-	-	228.365.625	228.365.625	-	-	-	94,54	94,54	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	-	-	97.744.000	57.965.800	71.035.000	-	-	97.418.400	53.393.800	59.737.500	#DIV/0!	#DIV/0!	99,67	-	-	(4,54)	(8,33)
7	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	-	-	-	-	141.700.000	-	-	-	-	92.112.150	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
8	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana	-	-	-	29.137.000	-	-	-	-	28.556.000	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
9	Program Penyediaan/ Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya	297.043.000	297.043.000	-	-	-	297.043.000	297.043.000	-	-	-	100,00	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-
10	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.666.581.500	1.666.581.500	6.004.054.395	12.316.104.235	84.994.300	1.508.872.000	1.508.872.000	2.439.445.519	12.051.077.851	68.696.700	90,54	90,54	40,63	97,85	80,83	66,52	89,06
11	Program Peningkatan Produksi Perikanan	-	-	-	458.807.520	-	-	-	-	438.938.400	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	304.975.000	304.975.000	240.000.000	345.530.000	792.513.000	207.511.400	207.511.900	226.087.800	257.923.090	601.697.348	68,04	68,04	94,20	74,65	75,92	38,01	39,08
13	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	3.955.851.000	3.955.851.000	3.846.185.350	-	503.038.600	3.781.595.878	3.781.595.878	3.833.736.245	-	399.458.773	95,60	95,60	99,68	#DIV/0!	79,41	(25,69)	(24,66)
14	Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	751.635.000	751.635.000	390.209.000	410.160.300	604.948.800	599.102.700	599.102.700	257.222.200	288.585.000	490.544.260	79,71	79,71	65,92	70,36	81,09	1,13	6,28
15	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	190.735.000	190.735.000	218.238.255	197.585.000	161.622.600	190.649.400	190.649.400	206.208.155	184.722.900	91.654.600	99,96	99,96	94,49	93,49	56,71	(3,31)	(13,16)
16	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Ekonomi masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil (DAK)	-	-	-	-	1.039.900.000	-	-	-	-	1.026.714.000	-	-	-	-	98,73	-	-
17	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	-	-	-	-	2.259.839.600	-	-	-	-	2.013.693.419	-	-	-	-	89,11	-	-
18	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan	-	-	-	-	200.000.000	-	-	-	-	197.910.000	-	-	-	-	98,96	-	-
	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	-	-	-	-	2.825.994.600	-	-	-	-	2.687.410.000	-	-	-	-	95,10	-	-
	Program Pengembangan Sarana dan prasarana Penyuluhan Perikanan	-	-	-	-	135.061.000	-	-	-	-	134.998.500	-	-	-	-	99,95	-	-
	JUMLAH	8.133.556.700	8.542.610.200	11.916.697.208	15.114.993.373	10.574.996.595	7.538.324.203	7.904.962.933	8.137.592.183	14.508.129.300	9.522.148.329	92,68	92,54	68,29	95,99	90,04	10,33	12,93

Berdasarkan Pada Tabel 2.6 diatas maka dapat dianalisa bahwa rata-rata rasio antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran pada Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dijelaskan bahwa pada pos anggaran belanja daerah khusus pada pos anggaran belanja langsung diperoleh rata-rata rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 87,91% . capaian rasio penyerapan anggaran ini dipengaruhi sedikitnya penyerapan realisasi pagu anggaran pada tahun 2013, dimana rasio realisasi dengan pagu anggaran hanya sebesar 68,29%.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan

Berdasarkan analisis faktor internal, eksternal, potensi dan permasalahan Kelautan dan Perikanan dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan Kelautan dan Perikanan lima tahun ke depan. Tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian sumberdaya alam masih perlu ditingkatkan, hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya penggunaan bahan kimia yang berbahaya dan alat penangkapan ikan terlarang/tidak ramah lingkungan.
2. Rendahnya produktifitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan yang antara lain disebabkan armada yang digunakan didominasi oleh kapal berukuran kecil (tradisional), belum terintegrasinya sistem produksi hulu dan hilir dan masih terbatasnya sarana dan prasarana yang ada dan belum adanya sistim jaminan mutu produk kelautan dan perikanan.
3. Dalam pengembangan perikanan budidaya, masih dihadapkan pada permasalahan implementasi kebijakan tata ruang, terbatasnya prasarana saluran irigasi, terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul dan serangan hama penyakit ikan.
4. Pada aspek pengolahan hasil perikanan masih bersifat tradisional baik sarana dan prasarana maupun cara pengolahan sehingga belum sepenuhnya dapat mendukung persyaratan mutu produk olahan hasil perikanan. serta rendahnya SDM pengolah menyebabkan masih ada penggunaan bahan berbahaya seperti borax dan formalin
5. Aktifitas pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berada di daratan maupun sepanjang pesisir pantai dan lautan, tidak luput dari tantangan dan potensi bencana alam yang dapat terjadi seperti banjir dan abrasi pantai.

Adapun peluang yang mendukung pembangunan Kelautan dan Perikanan lima tahun ke depan antara lain:

1. Adanya upaya percepatan dan terobosan dalam pembangunan kelautan dan perikanan yang didukung dengan kebijakan ekonomi serta iklim sosial politik yang kondusif. Dalam kaitan ini, koordinasi dan dukungan lintas sektor para pemangku kepentingan menjadi salah satu persyaratan yang sangat penting.
2. Peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan kualitas hidup masyarakat meningkatkan permintaan terhadap produksi kelautan dan perikanan, selain itu adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) atau globalisasi ekonomi, semakin membuka peluang pengembangan pasar ekspor. Meningkatnya permintaan pasar tersebut perlu didukung dengan munculnya usaha-usaha kelautan dan perikanan baru yang inovatif, produktif dan tanggap terhadap permintaan pasar.
3. Peningkatan akan produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan kesadaran akan manfaat gizi ikan agar lebih sehat, kuat dan cerdas dapat menjadi peluang pengembangan pasar bagi komoditas produk perikanan.
4. Adanya dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan kelautan dan perikanan

Faktor Pendorong :

1. Potensi SDA dan SDM dibidang perikanan cukup besar
2. Ketersediaan lahan untuk perikanan Budidaya
3. Ketersediaan Sarana Prasarana bidang perikanan (Penangkapan,Budidaya dan P2HP)
4. Motivasi Pelaku Usaha Perikanan yang cukup tinggi
5. Produk-produk hasil perikanan yang bernilai tambah.
6. Terjalannya kerjasama pelaku usaha dengan pihak investor
7. Minat masyarakat yang cukup tinggi untuk mengkonsumsi ikan maupun ikan olahan.

Faktor Penghambat :

1. Kepemilikan modal rendah
2. Pemasaran hasil yang belum optimal
3. Ketersediaan bibit ikan terbatas dalam Kabupaten.
4. Sumber daya manusia pelaku usaha perikanan yang belum optimal
5. Sarana dan prasarana bidang perikanan belum memadai
6. Belum optimalnya peran Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan
7. Berlakunya pasar bebas yang dapat mendorong masuknya komoditas perikanan dari luar negeri dengan harga yang lebih murah
8. Perubahan iklim yang tidak menentu yang dapat mengganggu aktivitas pelaku usaha perikanan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERIKANAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan

Pelaksanaan pembangunan perikanan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2010-2015 belum dapat memberikan manfaat maupun dampak positif yang bisa dirasakan oleh nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan, tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala yang dihadapi. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan perikanan dan kelautan Kabupaten Pesisir Selatan antara lain yaitu :

1. Penurunan potensi Sumberdaya Ikan (SDI) akibat kerusakan habitat (terumbu karang dan mangrove), penangkapan yang berlebihan (overfishing), penggunaan alat tangkap terlarang (mini trawl), penggunaan bahan peledak dan pencemaran limbah industri dan rumah tangga.
2. Terbatasnya sarana prasarana dan teknologi budidaya perikanan dan pengolahan hasil perikanan sehingga produksi yang dihasilkan belum optimal.
3. Dukungan sarana dan prasarana khususnya perikanan tangkap yang belum memadai guna memenuhi kebutuhan nelayan dalam mengeksploitasi sumberdaya perikanan lepas pantai seperti PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) dan jumlah SDM Aparatur yang melayani operasional sarana/prasarana dan pembinaan dalam bidang usaha perikanan.
4. Sebagian nelayan laut Kabupaten Pesisir Selatan masih dikategorikan masyarakat miskin yang antara lain disebabkan karena skala usaha penangkapan yang dilakukan masih bersifat tradisional yaitu menggunakan perahu motor berkapasitas kecil dengan kemampuan one day fishing, sehingga terbatas pada perairan pantai yang sudah berkurang sumberdaya ikannya.
5. Konflik Nelayan dan Tindak Pidana Perikanan yang secara umum disebabkan karena menurunnya sumberdaya perikanan dan kelautan, penggunaan bahan dan alat tangkap terlarang, perebutan daerah penangkapan (fishing ground), pelanggaran jalur penangkapan, pengrusakan lingkungan / penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan.

6. Kerusakan lingkungan, bencana alam dan dampak perubahan iklim serta meningkatnya aktivitas pemanfaatan sumberdaya di kawasan hulu dan pesisir tanpa memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian lingkungan serta pencemaran limbah industri dan rumah tangga yang menyebabkan menurunnya daya dukung lingkungan perairan berakibat pada rendahnya produktivitas perikanan budidaya.
7. Penurunan fungsi lahan budidaya yang dialih fungsikan menjadi lahan pemukiman penduduk
8. Terbatasnya ketersediaan benih unggul, induk unggul dan pakan ikan yang mengakibatkan terkendalanya aktifitas budidaya masyarakat.
9. Pengendalian terhadap hama dan penyakit yang belum dipahami oleh para pelaku usaha.
10. Keamanan pangan produk olahan hasil perikanan ikan yang belum memiliki sistem jaminan mutu olahan hasil perikanan dari pemberian bahan tambahan makanan yang berbahaya seperti formalin dan borax merupakan salah satu permasalahan dalam rangka peningkatan mutu hasil olahan perikanan (aman mulai dari pra produksi sampai dengan pendistribusian).

3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA”

Untuk mewujudkan visi dilaksanakan melalui 5 (lima) Misi yaitu :

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN, akuntabel dan berkinerja serta pelayanan politik yang prima
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.
Tujuan : Mewujudkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial dalam mendukung sektor unggulan daerah.

3. Meningkatkan kehidupan beragama yang rukun , toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK.

Tujuan : Mewujudkan perubahan sikap mental masyarakat, revitalisasi kelembagaan agama dan kelembagaan sosial kemasyarakatan sesuai nilai-nilai agama, adat, budaya dan kearifan lokal.

4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.

Tujuan : Mewujudkan produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan jasa pariwisata yang berdaya saing melalui peran koperasi, UMKM, dan industri.

5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang.

Tujuan : Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang aman, damai, tertib dan taat hukum

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat :

a. Arah Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan diimplementasikan dalam keterkaitanya dengan 4 Agenda/Nawacita yang dirumuskan secara umum sebagai berikut :

1. Agenda/Nawacita Ke-1 :

Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

Sub Agenda : Memperkuat jati diri sebagai Negara Maritim

Implementasi dalam memperkuat jati diri sebagai negara maritim adalah dengan meningkatkan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan secara terpadu dan terintegritas, meningkatkan sarana dan prasarana pengawasan yang representatif, mengintensifkan penegakan hukum dan pengadilan ilegal fishing serta kegiatan yang merusak sumber dayakelautan dan perikanan.

2. Agenda/nawacita ke-4 :

Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

Sub Agenda : Pemberantasan perikanan ilegal/IUU fishing.

Yang akan dilaksanakan dalam rangka pemberantasan ilegal fishing/IUU fishing adalah dengan meningkatkan koordinasi dalam penanganan tindak pidana perikanan, melakukan penguatan sarana sistem pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, meningkatkan penataan sistem perizinan usaha perikanan dan penertiban ketaatan kapal di pelabuhan perikanan

3. Agenda/nawacita ke-6 :

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

Sub Agenda : Akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan hasil perikanan.

Upaya yang dilaksanakan adalah melalui peningkatan mutu dan kualitas benih/induk, inovasi teknologi perikanan (budidaya, perikanan tangkap dan pengolahan hasil perikanan), melakukan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, peningkatan SDM pelaku usaha perikanan dan fasilitas sarana dan prasarana perikanan

4. Agenda/nawacita ke-7 :

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Sub Agenda : Peningkatan kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi perikanan.

Implementasi yang akan dilakukan adalah meningkatkan faktor-faktor produksi dan sarana prasarana pendukung produksi dan mempertahankan ketersediaan komoditi perikanan sebagai sumber pangan dan ekonomi.

Sub Agenda : Pengembangan ekonomi maritim dan kelautan.

Implementasi yang akan dilakukan adalah meningkatkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai sumber ekonomi pembangun dan sebagai sumber peningkatan SDM masyarakat kelautan dan perikanan, menyediakan data dan informasi, meningkatkan harkat dan taraf hidup masyarakat nelayan masyarakat perikanan.

b. Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat :

Tujuan : terselenggarannya Pembangunan Kelautan dan Perikanan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara rasional, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan demi meningkatkan taraf hidup masyarakat kelautan dan perikanan.

Sasaran Pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

1. Berkurangnya kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan
2. Meningkatnya penataan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
3. Meningkatnya produksi perikanan
4. Meningkatnya mutu produksi perikanan

strategi yang akan dilaksanakan adalah :

1. Peningkatan SDM masyarakat kelautan dan perikanan
2. Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara efisien dan berkelanjutan
3. Peningkatan sarana dan prasarana serta infrastruktur kelautan dan perikanan
4. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk hasil perikanan

5. Penetrasi pasar regional, nasional dan internasional melalui diversifikasi produk peningkatan industri olahan hasil perikanan.

kebijakan antara lain :

- a. Memperkuat pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan
- b. Meningkatkan penataan dan pengelolaan lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan secara komprehensif dengan melibatkan peran serta masyarakat, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
- c. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana penangkapan ikan
- d. Mengoptimalkan potensi budidaya yang belum tergarap serta membangun lapangan kerja diiringi dengan dukungan pengembangan modal dan kepastian berusaha
- e. Mengembangkan industri pengolahan, perbaikan mutu hasil perikanan dan memperkuat jejaring serta daya tembus pemasaran produk hasil kelautan dan perikanan dalam dan luar negeri dalam rangka stabilitas produk serta ketahanan pangan.

Keempat Agenda nawacita dan kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat tersebut diatas juga diimplementasikan dalam renstra Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan, yang untuk pencapaiannya tertuang dalam bentuk program dan kegiatan.

3.4. Telaahan rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang wilayah adalah "mewujudkan keterpaduan ruang yang memberikan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan sampai tahun 2030 melalui konservasi, pengembangan ekonomi berbasis pangan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pariwisata dan mitigasi bencana secara berkelanjutan "

Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan provinsi dan Kabupaten berbatasan;

2. Penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi Taman Nasional Kerinci Seblat, Hutan Lindung, Hutan Suaka Alam Wisata;
3. Pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
4. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Utara-Selatan;
5. Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan pengembangan wilayah pusat-pusat pemukiman melalui pengolahan sektor perkebunan, perternakan, pertanian dan perikanan dan pariwisata sesuai daya dukung wilayah;
6. Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan
7. Peningkatan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pangan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan;
8. Peningkatan potensi Sumber Daya Manusia untuk mengelola potensi sumber daya alam;
9. Pembangunan kawasan wisata Alam dan laut melalui penetapan kawasan wisata sebagai kawasan unggulan, dikelola dengan ramah lingkungan;
10. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penata ruang yang berimbang serta mitigasi bencana.

Strategi Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

1. Strategi untuk meningkatkan kualitas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan propinsi dan kabupaten berbatasan.
2. Strategi untuk menguatkan dan memulihkan fungsi kawasan lindung yang meliputi Taman Nasional Kerinci Seblat, Hutan Lindung dan Hutan Suaka Alam Wisata:
3. Strategi untuk mengembangkan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan:
4. Strategi untuk mengurangi kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Utara – Selatan.

5. Strategi untuk meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan pengembangan wilayah pusat-pusat pemukiman melalui pengolahan sektor perkebunan, peternakan, pertanian dan perikanan dan pariwisata sesuai daya dukung wilayah.
6. Strategi untuk meningkatkan produktifitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian, perkebunan dan kehutanan dengan pengelolaan yang ramah lingkungan.
7. Strategi untuk meningkatkan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pangan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan.
8. Strategi untuk meningkatkan dan mendorong potensi sumber daya manusia untuk mengelola potensi sumber daya alam.
9. Strategi untuk membangun kawasan wisata alam dan laut melalui penetapan kawasan wisata alam dan bahari (pesisir) sebagai kawasan unggulan, dikelola dengan ramah lingkungan.
10. Strategi untuk membangun prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang serta mitigasi bencana.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan dibidang perikanan agar mendukung terwujudnya penataan ruang wilayah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan pusat-pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan wilayah dan pusat-pusat permukiman disertai pemerataan secara seimbang, guna menggerakkan Rencana perkembangan industri, pertanian (dalam arti luas) dan pariwisata secara selaras dan berkelanjutan
2. Mendorong pertumbuhan wilayah perdesaan yang lebih mandiri.
3. Meningkatkan aksesibilitas antar perdesaan dan perkotaan.
4. Mengembangkan kawasan agrowisata, ekowisata, agropolitan, dan minapolitan sebagai andalan pengembangan kawasan perdesaan di Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan

5. Pengembangan kawasan budidaya melalui optimasi fungsi kawasan pada kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perkebunan, kawasan perikanan, kawasan peternakan, kawasan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan tujuan pariwisata dan daya tarik wisata, kawasan permukiman, serta kawasan perdagangan, dalam mendorong ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
6. Mengembangkan kawasan perikanan dengan mengoptimalisasikan kawasan perikanan tangkap di bagian utara Kabupaten Pesisir Selatan melalui pengembangan tempat pendaratan ikan (TPI), Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), serta mendorong pengembangan budidaya perikanan tambak/air tawar sebagai salah satu sektor perekonomian yang mulai berkembang yang difasilitasi oleh adanya industri pengolahan perikanan, sedangkan pengembangan perikanan air tawar lainnya dikembangkan menyebar sesuai potensi yang ada pada peruntukkan pertanian lahan kering, danau, kolam, saluran irigasi/sungai, sangat didorong pembentukan dan pengembangan cluster sentra perikanan, serta dibatasi/terbatas pada peruntukkan pertanian lahan basah (sistem mina padi) sebagai embrio minapolitan perikanan tangkap dan budidaya
7. Pengembangan kawasan pesisir sesuai dengan fungsi sebagai penopang kelestarian lingkungan hidup dan mendorong pertumbuhan wilayah melalui pelestarian sumberdaya pesisir dan mendorong perkembangan fungsi budidaya pesisir untuk perikanan, permukiman, pariwisata, dan prasarana perhubungan
8. Melestarikan kawasan penunjang ekosistem pesisir baik sebagai kawasan hutan mangrove, terumbu karang, sea grass, dan estuaria sebagai satu kesatuan ekosistem yang terpadu di bagian darat maupun laut; pada kawasan ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata dan penelitian sedangkan pengambilan potensi perikanan dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung
9. Mengembangkan kawasan budidaya meliputi permukiman, pelabuhan, pariwisata, industri, perikanan dsb secara terbatas serta terkendali (dalam artian

tidak mengubah fungsi kawasan pesisir, meningkatkan kualitas lingkungan dan lestari)

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang di masa lima tahun mendatang.

Isu-isu strategis diperoleh dari identifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat baik internal maupun eksternal yang dapat menciptakan peluang dan ancaman dimasa lima tahun mendatang.

Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan telah merumuskan faktor kunci pembangunan Kelautan dan Perikanan yang dapat menjadi isu-isu strategis, yakni :

1. Potensi SDA dan SDM di Kabupaten Pesisir Selatan cukup besar khususnya dibidang perikanan, hal ini belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga merupakan peluang untuk dikembangkan melalui pemanfaatan teknologi yang tepat dan penggunaan input yang memadahi tanpa mengesampingkan kelestarian sumberdaya alam.
2. Wilayah laut dan darat merupakan potensi untuk pengembangan perikanan dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Produk-produk perikanan yang bernilai ekonomis, jika dikelola secara profesional akan mampu berperan dalam menyerap tenaga kerja yang ada serta mampu menyediakan kebutuhan produk perikanan, dan dapat meningkatkan konsumsi ikan
4. Tersedianya lembaga perguruan tinggi dan lembaga penelitian merupakan peluang untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi bagi kepentingan masyarakat perikanan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

“ MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERIKANAN “

Dengan sasaran :

1. Meningkatnya Produksi Perikanan
2. Meningkatnya Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan

Tabel 4.1										
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERIKANAN										
No.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	2		5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perikanan	Pendapatan per kapita masyarakat perikanan (rupiah)			26.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000	45.000.000	52.000.000
			1. Meningkatnya Produksi Perikanan	1. Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	46.660	50.371	53.945	57.606	61.203	64.876
			2. Meningkatnya Nilai tambah Produk Kelautan dan Perikanan	2. Nilai tambah Produk Hasil Perikanan (Rupiah)	89.475.600.000	92.115.139.000	142.429.802.500	143.465.492.500	147.357.571.725	153.101.348.071

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Berikut strategi dan kebijakan yang sudah dirumuskan Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan, yakni :

Strategi

1. Peningkatan produksi sektor perikanan (Budidaya, penangkapan dan P2HP) dengan memanfaatkan teknologi, penggunaan sarana dan prasarana dan SDM yang tersedia
2. Peningkatan kemampuan pelaku usaha kelautan dan perikanan untuk berusaha sesuai dengan standar berlaku dengan menerapkan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB), Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) dan Cara Pengolahan Ikan Yang Baik dalam memenuhi kebutuhan pasar.
3. Penguatan kelembagaan dan memperluas lapangan pekerjaan di bidang perikanan

Kebijakan

1. Mengembangkan budidaya perikanan dan perikanan tangkap dengan mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas secara berkelanjutan.
2. Mengembangkan budidaya perikanan dan peningkatan daya saing produk perikanan dengan memanfaatkan teknologi dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Kelautan dan Perikanan untuk memenuhi kebutuhan pasar.
3. Membangun pola pemberdayaan masyarakat perikanan secara partisipatif sehingga terbentuk kelembagaan kelompok yang mandiri, partisipatif, dan dinamis sekaligus mampu memberikan lapangan kerja di bidang perikanan.

Untuk dapat melihat relevansi dan konsistensi antar pernyataan misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan, dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini.

TABEL. 5.1				
TUJUAN , SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN				
Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri , Unggul, Agamis dan Sejahtera				
Misi : Meningkatkan Produksi dan Nilai Tambah Dengan Tetap Mengedepankan Pembangunan Berkelanjutan				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	
1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perikanan	1. Meningkatnya Produksi Perikanan	1. Peningkatan produksi budidaya perikanan dan perikanan tangkap dengan memanfaatkan teknologi, penggunaan sarana dan prasarana dan SDM yang tersedia	1. Mendorong pelaku usaha perikanan dalam Mengembangkan perikanan budidaya dan perikanan tangkap dengan mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas secara berkelanjutan.	
	2. Meningkatnya Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan	1. Peningkatan kemampuan pelaku usaha kelautan dan perikanan sesuai dengan standar mutu yang berlaku dalam memenuhi kebutuhan pasar.	1. Meningkatkan SDM pelaku usaha bidang perikanan dalam peningkatan daya saing produk untuk memenuhi kebutuhan pasar	
		2. Penguatan kelembagaan dan memperluas lapangan pekerjaan di bidang perikanan	2. Membangun pola pemberdayaan masyarakat perikanan secara partisipatif sehingga terbentuk kelembagaan kelompok yang mandiri, partisipatif, dan dinamis sekaligus mampu memberikan lapangan kerja di bidang perikanan	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan prioritas.

Program yang disusun oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa kegiatan untuk masing-masing program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah.

Indikator keluaran program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome program merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Sedangkan kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan. Pendanaan indikatif merupakan perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan/pendanaan untuk melaksanakan program/kegiatan pertahun.

5.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas

1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap
 - a. Penyediaan Sarana Prasarana Pemberdayaan Skala Kecil Untuk Nelayan (DAK)
 - b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
 - c. Penunjang Kegiatan DAK Pemberdayaan Nelayan Kecil
 - d. Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan
 - e. Pembangunan Rumah Jaga Balai Sekaya Maritim
 - f. Pengelolaan Balai Sekaya Maritim
 - g. Pelatihan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Yang Ramah Lingkungan
 - h. Pendampingan Kegiatan Pusat dan Propinsi Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil
 - i. Pelatihan Penanganan Hasil Tangkapan

- j. Pendampingan Asuransi Nelayan
 - k. Pendampingan Adi Bakhti Mina Bahari
 - l. Pelatihan Bidang Perikanan
 - m. Pengembangan Akses Permodalan Sertifikat Hak Tanah Nelayan (Sehat)
 - n. Penguatan Kelembagaan KUB Perikanan Tangkap
 - o. Sosialisasi dan Pendampingan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perikanan
 - p. Sosialisasi Peraturan Perundangan Perikanan
 - q. Sosialisasi Kartu Nelayan
 - r. Sosialisasi Peningkatan Alih Teknologi Perikanan dan Pemberdayaan Nelayan
 - s. Sosialisasi Izin Usaha dan Identifikasi Usaha Perikanan
 - t. Pembinaan KUB Perikanan Tangkap
 - u. Pro Gerakan Anti Kemiskinan (Pro Gakin)
2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
- a. Pengelolaan Pabrik Pengolahan Pakan Ikan
 - b. Pengelolaan Balai Benih Ikan (BBI) Pincuran Boga
 - c. Penunjang Kegiatan DAK Bidang Perikanan Budidaya
 - d. Pelatihan Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan
 - e. Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Ikan (DAK)
 - f. Pembinaan Unit Pembenihan Rakyat (UPR)
 - g. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana BBI Pincuran Boga
 - h. Pengadaan Peralatan BBI Pincuran Boga
 - i. Peningkatan SDM Aparatur BBI dan Pelaku Usaha Perikanan
 - j. Cetak Kolam Masyarakat
 - k. Demfarm Budidaya Lele Sistem Bioflog
 - l. Pendamping Kegiatan Pusat dan Provinsi Bidang Perikanan Budidaya
 - m. Percontohan Budidaya Sistem Bioflog
 - n. Pembinaan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan)
 - o. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
 - p. Demfarm Budidaya Udang Bersama Padi / UGADI
 - q. Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Perikanan Budidaya
 - r. Demfarm Budidaya Nila Sistem Bioflog

- s. Demparm Budidaya Belut
 - t. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kolam Perikanan Rakyat
 - u. Operasional Kawasan Sentra Mina Politan
3. Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan
- a. Promosi dan Publikasi Produk Hasil Kelautan dan Perikanan
 - b. Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)
 - c. Pendamping Kegiatan Pusat dan Provinsi Bidang P2HP
 - d. Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi
 - e. Pembinaan Poklahsar bidang P2HP
 - f. Penguatan Kelembagaan Poklahsar
 - g. Peningkatan SDM Petugas Pembina Mutu Pengolahan Hasil Perikanan
 - h. Peningkatan Investasi dan Akses Permodalan
 - i. Pembangunan Bangsal Pengolahan Hasil Perikanan
 - j. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - k. Pengawasan Mutu Hasil Perikanan
 - l. Bina Mutu dan Diversifikasi Produk kelautan dan Perikanan
 - m. Pelatihan Cara Pengolahan Yang Baik (GMP / SSOP)
 - n. Study Banding Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan
 - o. Sertifikasi Produk Kelautan dan Perikanan
 - p. Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
 - q. Pelatihan Pembentukan Kelembagaan Usaha Perikanan

5.2. Pendanaan Indikatif

Rencana Program dan Kegiatan, Target dan Pendanaan Indikatif disajikan dalam Tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel. 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Perikanan
Kabupaten Pesisir Selatan

No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN																		LOKASI
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		OPD PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
1.	2.		4.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.		
1.	Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat Perikanan					Pendapatan Perkapita Masyarakat Perikanan (Rp/ahai)	26.000.000	26.000.000			30.000.000		35.000.000	40.000.000	45.000.000		52.000.000		52.000.000		52.000.000		Dinas Perikanan Kab Pesel.		
1.	Meningkatnya Produktif Perikanan					1. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produk Budidaya Perikanan (Ton)	10.327	12.210	542.481.750	13.431	2.021.847.430	14.505	2.101.000.000	15.666	3.458.569.640	16.763	3.827.309.600	17.936	3.915.207.100	17.936	3.915.207.100	Dinas Perikanan Kab Pesel.		
	a.	Pengelolaan Pabrik Pengolahan Pakan Ikan				Eropertasionalnya Pabrik Pengolah Pakan Ikan	12 Bulan	136.981.400	12 Bulan	107.121.000	12 Bulan	120.000.000	12 Bulan	126.000.000	12 Bulan	132.300.000	12 Bulan	135.000.000	12 Bulan	135.000.000	12 Bulan	135.000.000	15 Kcc		
	b.	Pengelolaan Benih Ikan Bili Pincuran Bogo				Eropertasionalnya Bili Pincuran Bogo	12 Bulan	209.000.000	12 Bulan	149.911.350	12 Bulan	65.000.000	12 Bulan	68.160.000	12 Bulan	71.662.000	12 Bulan	74.000.000	12 Bulan	74.000.000	12 Bulan	74.000.000	15 Kcc		
	c.	Pembenihan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Ikan (DAK)				Tersedianya Pembenihan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Ikan						16 Paket	658.269.000	16 Paket	658.269.000	16 Paket	658.269.000	16 Paket	658.269.000	16 Paket	658.269.000	15 Kcc			
	d.	Pemenuhan Kegiatan DAK Bidang Perikanan Budidaya				Terlaksananya Kegiatan DAK bidang perikanan budidaya	12 Bulan	67.041.800	12 Bulan	67.936.800	12 Bulan	75.000.000	12 Bulan	78.750.000	12 Bulan	82.887.500	12 Bulan	85.000.000	12 Bulan	85.000.000	12 Bulan	85.000.000	15 Kcc		
	e.	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana BBI Pincuran Bogo yang dirubah				Jumlah Sarana dan Prasarana BBI Pincuran Bogo yang dirubah			1 Paket	373.873.730	1 Paket	50.000.000		1 Paket	100.000.000	1 Paket	105.000.000	1 Paket	105.000.000	1 Paket	105.000.000	15 Kcc			
	f.	Pengadaan Peralatan BBI Pincuran Bogo				Jumlah Peralatan BBI Pincuran Bogo Yang Didakan			-	1 Paket	30.000.000	1 Paket	35.000.000		1 Paket	40.000.000	1 Paket	42.000.000	1 Paket	42.000.000	1 Paket	42.000.000	15 Kcc		
	g.	Peningkatan SGM Aparatur BBI dan Pelaku Usaha Perikanan				Jumlah Aparatur BBI & Pelaku Usaha Perikanan			5 Orang	50.000.000	5 Orang	52.500.000	5 Orang	55.125.000	5 Orang	57.881.250	5 Orang	57.881.250	5 Orang	57.881.250	5 Orang	57.881.250	15 Kcc		
	h.	Gerek Kolan Masyarakat				Pembinaan Lush Lahan Budidaya	3 Poldakan	600.000.000	3 Poldakan	600.000.000	3 Poldakan	600.000.000	3 Poldakan	600.000.000	3 Poldakan	600.000.000	3 Poldakan	600.000.000	3 Poldakan	600.000.000	3 Poldakan	600.000.000	15 Kcc		
	i.	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan				Jumlah Pembudidayaan yang diarahi CPH dan CBB	-	40 orang	52.139.000	40 orang	70.000.000	40 orang	75.000.000	40 orang	78.750.000	40 orang	82.887.500	40 orang	85.000.000	40 orang	85.000.000	40 orang	85.000.000	15 Kcc	
	j.	Penanganan Hama dan Penyakit ikan				Terlaksananya Pengendalian Hama dan Penyakit	-	-	-	10 Kasus	35.000.000	10 Kasus	84.000.000	10 Kasus	88.200.000	10 Kasus	92.000.000	10 Kasus	92.000.000	10 Kasus	92.000.000	10 Kasus	92.000.000	15 Kcc	
	k.	Latihan Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan				Terlaksanya Masyarakat tentang Pengendalian Hama dan Penyakit	-	-	-	20 Orang	35.000.000	20 Orang	36.750.000	20 Orang	38.587.500	20 Orang	40.500.000	20 Orang	40.500.000	20 Orang	40.500.000	20 Orang	40.500.000	15 Kcc	
	l.	Pembinaan Unit Pembinaan Rakyat (UPR)				Terlaksanya Unit Pembinaan Rakyat	15 UPR	29.361.350	15 UPR	33.856.350	15 UPR	37.500.000	15 UPR	39.375.000	15 UPR	41.343.750	15 UPR	42.500.000	15 UPR	42.500.000	15 UPR	42.500.000	15 Kcc		
	m.	Teraksananya dampam Budidaya Lela Sistem Bioflok				Teraksananya dampam Budidaya Lela Sistem Bioflok	3 Poldakan	450.000.000	3 Poldakan	495.000.000	3 Poldakan	519.750.000	3 Poldakan	519.750.000	3 Poldakan	545.375.000	3 Poldakan	575.000.000	3 Poldakan	575.000.000	3 Poldakan	575.000.000	15 Kcc		
	n.	Pendamping Kegiatan Pusat dan Provinsi Bidang Perikanan Budidaya				Teraksananya Kegiatan Pusat dan Provinsi Bidang Perikanan Budidaya	-	12 Bulan	46.635.500	12 Bulan	65.000.000	12 Bulan	68.160.000	12 Bulan	71.662.000	12 Bulan	75.000.000	12 Bulan	78.750.000	12 Bulan	82.887.500	12 Bulan	85.000.000	15 Kcc	
	o.	Pemcobaan Budidaya Sistem Bioflok				Terlaksananya Budidaya Sistem Bioflok	-	1 Paket	300.000.000	1 Paket	300.000.000	1 Paket	315.000.000	1 Paket	330.750.000	1 Paket	347.287.500	1 Paket	347.287.500	1 Paket	347.287.500	1 Paket	347.287.500	15 Kcc	
	p.	Pembinaan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan)				Terlaksanya Kelompok Pembudidaya Ikan	-	70 Pokdakan	52.746.200	75 Pokdakan	150.000.000	80 Pokdakan	165.375.000	85 Pokdakan	157.500.000	85 Pokdakan	174.000.000	80 Pokdakan	174.000.000	80 Pokdakan	174.000.000	80 Pokdakan	174.000.000	15 Kcc	
	q.	Defmarr Budidaya Udang Bersama Padi / UGADI				Terlaksananya dampam Budidaya Udang Bersama Padi	-	1 Poldakan	149.161.500	1 Poldakan	150.000.000	1 Poldakan	157.500.000	1 Poldakan	165.375.000	1 Poldakan	171.643.750	1 Poldakan	171.643.750	1 Poldakan	171.643.750	1 Poldakan	171.643.750	15 Kcc	
	r.	Kasifikasi Sertifikasi Hak Asasi Tanah Perikanan Budidaya				Tersertifikasinya Tanah Pembudidayaan Perikanan	50 Persil	55.587.000	50 Persil	48.627.500	50 Persil	51.500.000	50 Persil	56.175.000	50 Persil	58.983.750	50 Persil	62.000.000	50 Persil	62.000.000	50 Persil	62.000.000	50 Persil	62.000.000	15 Kcc
	s.	Defmarr Budidaya Nila Sistem Bioflok				Terlaksananya dampam Budidaya Nila Sistem Bioflok	2 Poldakan	189.838.500	2 Poldakan	210.000.000	2 Poldakan	230.500.000	2 Poldakan	230.500.000	2 Poldakan	230.500.000	2 Poldakan	230.500.000	2 Poldakan	230.500.000	2 Poldakan	230.500.000	2 Poldakan	230.500.000	15 Kcc
	t.	Pemampuan Budidaya Belut				Terlaksananya dampam Budidaya Belut	-	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	52.500.000	1 Paket	55.125.000	1 Paket	55.125.000	1 Paket	55.125.000	15 Kcc	
	u.	Operasional Kawasan Sentra Mina Politan				Terlaksanya kelompok penerima program di kawasan Mina Politan	9 Pokdakan	44.510.200	9 Pokdakan	60.000.000	9 Pokdakan	60.000.000	9 Pokdakan	60.000.000	9 Pokdakan	60.000.000	9 Pokdakan	60.000.000	9 Pokdakan	60.000.000	9 Pokdakan	60.000.000	9 Pokdakan	60.000.000	15 Kcc
	v.	Sosialisasi Witsda Edukasi Perikanan Budidaya				Jumlah Anak sekolah menerima sosialisasi	0	-	-	-	-	-	-	-	-	5 Sekolah	60.000.000	5 Sekolah	65.000.000	5 Sekolah	65.000.000	5 Sekolah	65.000.000	15 Kcc	
	w.	Pemediaan Sarana dan Prasarane Kolam Perikanan Rakyat				Tersedianya Penyediaan Sarana dan Prasarane Kolam Perikanan Rakyat	0	-	-	-	-	-	-	-	-	6 poldakan	350.000.000	6 poldakan	350.000.000	6 poldakan	350.000.000	6 poldakan	350.000.000	15 Kcc	
	2.	Peningkatan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap					2. Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produk Perikanan Tangkap (Ton)	37.509	34.440	243.560.000	36.540	2.710.331.300	39.440	4.612.230.000	41.940	4.708.000.000	44.440	4.551.275.000	46.940	4.977.000.000	46.940	5.072.200.000	Dinas Perikanan Kab Pesel.	
a.		Pemediaan Sarana Prasarana Pemberdayaan Siala Kecil Nelayan (DAK)				Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Siala Kecil Nelayan	-	3 Paket	1.300.000.000	4 Paket	2.099.080.000	5 Paket	2.250.000.000	5 Paket	2.250.000.000	5 Paket	2.250.000.000	5 Paket	2.250.000.000	5 Paket	2.250.000.000	5 Paket	2.250.000.000	15 Kcc	
b.		Pemediaan Sarana dan Prasarane Perikanan Tangkap				Jumlah Sarana dan Prasarane Perikanan Tangkap	1 paket	200.000.000	1 paket	735.000.000	1 paket	800.000.000	1 paket	800.000.000	1 paket	800.000.000	1 paket	800.000.000	1 paket	800.000.000	1 paket	800.000.000	15 Kcc		
c.		Pemenuhan Kegiatan DAK Pemberdayaan Nelayan Kecil				Jumlah Pekerjaan Yang Didanai DAK	-	12 Bulan	52.101.250	12 Bulan	55.000.000	12 Bulan	60.000.000	12 Bulan	60.000.000	12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	75.000.000	12 Bulan	75.000.000	12 Bulan	75.000.000	15 Kcc	
d.		Pemediaan Alat Bantu Perikanan Tangkap				Jumlah Alat Bantu Perikanan Tangkap	-	30 KUB	53.150.000	30 KUB	55.000.000	30 KUB	55.000.000	30 KUB	55.000.000	30 KUB	55.000.000	30 KUB	60.000.000	30 KUB	60.000.000	30 KUB	60.000.000	15 Kcc	
e.		Pembangunan Rumah Jaga Balai Sekaya Maritim				Tersedianya Rumah Jaga Balai Sekaya Maritim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 paket	225.000.000	3 paket	225.000.000	3 paket	225.000.000	3 paket	225.000.000	15 Kcc	
f.		Pengelolaan Balai Sekaya Maritim				Jumlah BOP Sekaya Maritim	-	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	20.000.000	15 Kcc	
g.		Latihan Pengkutan Alat Tangkap Ikan Yang Ramah Lingkungan				Meningkatnya pengetahuan nelayan dalam mengomunk alat tangkap	1 paket	90.970.000	1 paket	100.000.000	1 paket	120.000.000	1 paket	135.000.000	1 paket	135.000.000	1 paket	135.000.000	1 paket	135.000.000	1 paket	135.000.000	15 Kcc		
h.		Pendampingin Kegiatan Pusat dan Provinsi Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil				Terlaksananya Kegiatan Pusat dan Provinsi Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil	10 KUB	48.662.500	10 KUB	55.000.000	10 KUB	65.000.000	10 KUB	65.000.000	10 KUB	65.000.000	10 KUB	75.000.000	10 KUB	75.000.000	10 KUB	75.000.000	15 Kcc		
i.		Pendampingan Asuransi Nelayan				Terlaksananya asuransi nelayan	1 paket	53.165.500	1 paket	60.000.000	1 paket	60.000.000	1 paket	60.000.000	1 paket	60.000.000	1 paket	60.000.000	1 paket	60.000.000	1 paket	60.000.000	15 Kcc		
j.		Latihan Pengangan Hasil Tangkapan				Terlaksanya nelayan dalam penanganan hasil tangkapan	1 paket	53.165.500	1 paket	60.000.000	1 paket	60.000.000	1 paket	60.000.000	1 paket	60.000.000	1 paket	60.000.000	1 paket	60.000.000	1 paket	60.000.000	15 Kcc		
k.		Pendampingan Adi Bakhti Mina Bahari				Terlaksananya kegiatan Adi Bakhti Mina Bahari	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	15 Kcc		
l.		Latihan Bidang Perikanan				1. Meningkatkan Pengetahuan nelayan mengomunk alat tangkap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 Kcc	
m.		Sosialisasi Peraturan Perundangan Perikanan				2. Tersuplahnya syarat untuk menjadi nakhode dan KKM	-	1 paket	60.000.000	1 paket	60.000.000	1 paket	60.000.000	1 paket	60.000.000	1 paket	60.000.000	1 paket	60.000.000	1 paket	60.000.000	1 paket	60.000.000	15 Kcc	
n.		Sosialisasi Peraturan Perundangan Perikanan				Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangan perikanan	2 Kaki	73.881.500	2 Kaki	80.000.000	2 Kaki	75.000.000	2 Kaki	75.000.000	2 Kaki	75.000.000	2 Kaki	75.000.000	2 Kaki	75.000.000	2 Kaki	75.000.000	2 Kaki	75.000.000	15 Kcc
o.		Sosialisasi Peraturan Perundangan Perikanan				Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangan perikanan	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	15 Kcc
p.		Sosialisasi Peraturan Perundangan Perikanan				Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangan perikanan	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	15 Kcc
q.		Sosialisasi Peraturan Perundangan Perikanan				Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangan perikanan	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	15 Kcc
r.		Sosialisasi Peraturan Perundangan Perikanan				Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangan perikanan	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	15 Kcc
s.		Sosialisasi Peraturan Perundangan Perikanan				Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangan perikanan	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	15 Kcc
t.		Sosialisasi Peraturan Perundangan Perikanan				Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangan perikanan	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	15 Kcc
u.		Sosialisasi Peraturan Perundangan Perikanan				Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangan perikanan	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	15 Kcc
v.		Sosialisasi Peraturan Perundangan Perikanan				Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangan perikanan	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.					

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG DAN URUSAN

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

TABEL. 7.1

INDIKATOR KINERJA DINAS PERIKANAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

INDIKATOR KINERJA TUJUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	46.660	46.660	50.371	53.945	57.606	61.203	64.876	64.876

Tabel. 7.2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PERIKANAN KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2016-2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULASI	TAHUN						SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1		2	3	4	5	6	7	8		
1. Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	Jumlah Produksi Tahun (N)	46.660	50.371	53.945	57.606	61.203	64.876	RPJMD	DINAS PERIKANAN
2. Meningkatnya Nilai tambah Produk Kelautan dan Perikanan	Nilai tambah Produk Hasil Perikanan (Rupiah)	Harga Produk Segar - Harga Produk Olahan	89.475.600.000	92.115.139.000	142.429.802.500	143.465.492.500	147.357.571.725	153.101.348.071	RPJMD	DINAS PERIKANAN

TABEL. 7.3								
INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)								
DINAS PERIKANAN KABUPATEN PESIR SELATAN								
INDIKATOR	SATUAN	TAHUN						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Produksi Perikanan	Ton	46.660	50.371	53.945	57.606	61.203	64.876
2	Ragam Produk Perikanan	Jenis	6	7	9	11	13	15
3	Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Tahun	35	36	37	38	39	40
4	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Kelompok	170	186	203	220	237	253
5	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	Ton	23.660	24.011	25.636	27.261	28.000	28.886
6	Jumlah Unit Pengolahan Ikan	Unit	491	494	497	500	503	503

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan yang akan dilaksanakan dan ingin diwujudkan dalam periode tahun 2016-2021, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021, serta memperhatikan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Disamping itu, dalam penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 juga memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun yang lalu serta isu-isu strategis yang berkembang.

Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari Renstra tahun 2016-2021. Dinas Perikanan dan masyarakat berkewajiban untuk melaksanakan program-program pembangunan yang termuat dalam Renstra tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya.

Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 telah melibatkan peran pemangku kepentingan dalam upaya menghasilkan Renstra yang dapat menampung aspirasi dari masyarakat serta mengantisipasi kebutuhan pembangunan dalam jangka waktu lima tahunan.

Painan,

2019

